

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani. (2010). *Analisa Penerapan Manajemen Waktu Pada Proyek Konstruksi Jalan (Studi Kasus: PT. Sabaritha Perkasa Abadi, PT. Sinar Kasih Reinhard, PT. Dian Perkasa)*. Sumatera Utara.
- Binamarga, (2003), *pedoman perencanaan perkerasan jalan beton semen*, departemen permukiman dan prasarana wilayah tahun 2003.
- Binamarga, (2017), *manual desain perkerasan jalan 2017 revisi september 2017*, kementerian pekerjaan umum & perumahan rakyat.
- Daulay, I.,N (2013) Analisis Of Traffics Highway Network Capacity In Pekanbaru City By Using Maximum Flow Technique, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 1.
- Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. (2003) *Perencanaan Pengerasan Jalan Beton Semen, Pedoman Konstruksi Bangunan, Pd. T-14-2003*, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta.
- D.P. Dirjen. Perhubungan Darat. (2008) *Panduan batasan maksimum perhitungan JBI (Jumlah Berat yang diizinkan) dan JBKI (Jumlah Berat Kombinasi yang diizinkan) untuk mobil barang, kendaraan khusus, kendaraan penarik berikut kereta tempelan/ kereta gandengan*. Jakarta.
- Fahlivi, (2017) Sistem Tracking Position Berdasarkan Titik Koordinat GPS Menggunakan Smartphone, *Jurnal Infomedia*, Vol.2, No.1.
- Heri Susanto (2017) Perencanaan Tebal Perkerasan Kaku Dengan Metode Naasra Dan Rencana Anggaran Biaya Pada Jalan Sambera-Santan Kalimantan Timur, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Mulawaran, Samarinda.
- M. Fakhuriza Pradana (2016) Perencanaan Tebal Lapis Perkerasan Kaku pada Underpass Cibubur dengan Metode Bina Marga dan Naasra, Skripsi, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Cilegon.
- Muslimah, S Nababan, D.,& Suyadi (2019) Perencanaan Perkerasan Kaku (*Rigid Pavemen*) Dengan Metode Analisa Komponen, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Musamun Marauke.

Republik Indonesia. (1993) *Peraturan Pemerintah (PP) No.43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*. Lembaran Negara RI Tahun 1993. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2009) *Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2013) *Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara RI Tahun 2013. Sekretariat Negara. Jakarta.

